

BAB VI

SARAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Viva Sentana selama kurang lebihnya empat minggu, yang berlangsung mulai tanggal 24 Januari sampai dengan 15 Februari 2017, ada beberapa saran atau masukan bagi calon apoteker, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehinggadapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
- b. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
- c. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehinggadapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
- d. Mahasiswa calon apoteker jugadiharapkan dapat mempelajari macam – macam obat dari berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.

- e. Mahasiswa calon apoteker harus melatih diri untuk peduli dan berempati terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS Drug Information, 2011, Bethesda: American Society of Health System Pharmacist, (Electronic Version).
- Anonim, 2001, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Apotek Indonesia*.
- Anonim, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES /SK / IX / 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Depkes RI, Jakarta.
- British Medical Association, 2011, British National Formulary, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1983, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor6355/Dirjen/SK/69 tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Hartini, Y.S, dan Sulasmono, 2006, *Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MenKes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 1332 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 889 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 35 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Presiden Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Psikotropika.
- Presiden Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Kesehatan.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Seto, S., dan Nita, Y., 2012, Manajemen Farmasi : Dasar – Dasar Akuntansi untuk Apotek dan Industri Farmasi, Surabaya : Pusat Percetakan dan Penerbitan Universitas Airlangga.